

Analysis Financial Performance of Regional Government in Bengkulu Province

Rara Mianti¹ Fachruzzaman²

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu

Email Correspondent : fachruzzaman.ca@umib.ac.id

Abstract: *This research is using quantitative approach which aims to determine whether there are differences in the area ratio based on fiscal decentralization ratio of local financial, local financial dependency ratio, the ratio of the area of financial independence, effectiveness ratio, the ratio of growth (growth) PAD, the ratio (share) of revenue over the last ten years. By using the entire sample of local governments as Bengkulu province which is not an expansion of the area during the study period from 1995 to 2012. That the government of Bengkulu, South Bengkulu, North Bengkulu, Rejang Lebong. Testing the hypothesis in this study was conducted with two analytical tools are paired sample t - test and Wilcoxon signed ranks test using SPSS analysis tool using a significant level of 0.025 %. The results of these tests indicate that there is significantly different as the local government's financial performance during the period of Bengkulu province last ten years, well after the implementation of regional autonomy and after the economic crisis.*

Keywords : *financial performance, fiscal decentralization ratio, dependency ratio, local finance activity ratio, effectiveness ratio*

Abstrak: *Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rasio berdasarkan rasio desentralisasi fiskal keuangan daerah, rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio growth (pertumbuhan) PAD, dan rasio share (kontribusi) PAD selama sepuluh tahun terakhir. Dengan menggunakan seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu yang bukan merupakan daerah pemekaran selama periode penelitian 1995-2012. Diantaranya pemerintah Kota Bengkulu, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, dan Rejang Lebong. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan dua alat analisis yaitu paired sample t-test dan Wilcoxon signed ranks test dengan menggunakan alat analisis SPSS tingkat signifikan 0.025 %. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu selama periode sepuluh tahun terakhir, baik setelah pelaksanaan otonomi daerah dan setelah krisis ekonomi.*

Keywords: *Kinerja Keuangan, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas.*

PENDAHULUAN

Organisasi publik saat ini menghadapi tantangan besar dengan adanya kebijakan otonomi daerah karena salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan, potensi dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat.

Tidak hanya itu setelah otonomi digulirkan Indonesia harus mengalami keterpurukan lagi ketika krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 2007 namun saat itu Indonesia dapat menstabilkan ekonominya. Dua fenomena yang disebutkan sebelumnya menjadi alasan penulis untuk mengangkat judul ini, dengan melihat bagaimana kinerja pemerintah setelah melewati dua fenomena tersebut. Oleh karena itu berkaitan dengan terjadi krisis ekonomi dan hakekat otonomi daerah yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Berkaitan dengan hal tersebut maka harus dapat dilaksanakan suatu evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah yang akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam periode sepuluh tahun terakhir. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Banyak *proxy* penghitungan yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah, namun disini peneliti hanya menetapkan 6 *proxy* penghitungan yang diantaranya 4 *proxy* untuk menganalisis kinerja keuangan dan 2 diantaranya untuk melihat kemampuan daerah disisi pengukuran atau penilaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). 4 *proxy* tersebut diantaranya adalah rasio

kemandirian untuk menilai tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan; rasio derajat desentralisasi fiskal yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan, rasio ketergantungan keuangan daerah.

Dalam menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan PAD sangat menentukan sekali dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena semakin tinggi PAD disuatu daerah maka daerah tersebut akan menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pusat sehingga daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk membangun daerahnya sendiri dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah tersebut. Jadi PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah.

Dalam melaksanakan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu diadakan analisis potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan untuk itu digunakan *proxy* perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran *share* dan *growth*. *Share* merupakan rasio PAD terhadap total belanja daerah. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan, rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah. Sedangkan *growth* merupakan angka pertumbuhan PAD pada periode APBD dari tahun sebelumnya.

Beberapa penelitian sebelumnya seperti Permana (2013) mengemukakan fakta bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bengkulu dengan analisis rasio berdasarkan data keuangan yang bersumber dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam kurun waktu 2007 - 2011 masih sangat rendah dalam beberapa rasio tingkat desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian Valentina (2009) menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kota Bengkulu tidak mengalami perbedaan secara signifikan sebelum dan sesudah pemberlakuan otonomi daerah. Kemampuan keuangan daerah masih sangat rendah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat karena sebagian besar pendapatan

daerah masih berasal dari dana perimbangan, sehingga tingkat ketergantungan terhadap sumber dana dari pemerintah pusat atau provinsi sangat tinggi. Pengalokasian pengeluaran daerah terhadap penerimaan daerahnya dikategorikan kurang efisien.

Penelitian Lestari (2012) menunjukkan rasio PAD yang sangat rendah dan rasio transfer yang sangat tinggi dalam tiga tahun terakhir. Fakta ini semakin menguatkan bahwa dilihat dari derajat desentralisasi fiskal, kemandirian Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mendanai belanja mereka sendiri masih sangat kecil. Hasil penelitian Afrendi (2013) menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah di Provinsi Bengkulu masih tergolong rendah.

Perlu dilakukan penilaian atas kinerja pemerintah daerah sebagai evaluasi pelaksanaan otonomi daerah yang telah digulirkan. Berdasarkan paparan sebelum ini, maka penelitian ini akan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Bengkulu.

TINJAUAN PUSTAKA

Stakeholder Theory

Freeman (1984) dalam Roberts (1992) yang mendefinisikan *stakeholder* sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Dalam *Bussiness Dictionary*, pemangku kepentingan didefinisikan kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dalam sebuah organisasi karena dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan organisasi, tujuan, dan kebijakan.

Pemerintahan dalam hal ini merupakan bagian dari beberapa elemen yang membentuk masyarakat dalam sistem sosial yang berlaku. Keadaan tersebut kemudian menciptakan sebuah hubungan timbal balik antara pemerintahan dan para *stakeholder* yang berarti pemerintah harus melaksanakan peranannya secara dua arah untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan sendiri maupun *stakeholder* lainnya dalam sebuah sistem sosial. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dihasilkan dan dilakukan oleh masing-masing bagian dari *stakeholder* akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Sejalan dengan prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab maka dituntutlah segala pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam memajukan dan mensejahterakan daerahnya, dengan ikut andil dalam perencanaan dan penetapan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah serta sama-sama aktif dalam mengawasi jalannya kinerja

kebijakan tersebut demi terlaksananya prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Pemerintah daerah bersama dengan *stakeholder* kunci lainnya mempunyai peranan penting dalam proses memajukan suatu daerah. Kemajuan suatu daerah terutama harus terletak pada bagaimana pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi suatu daerah harus mampu mengelola anggaran yang ada untuk kepentingan rakyat di daerahnya. Kepentingan rakyat yang dimaksudkan disini adalah bagaimana anggaran yang telah disahkan tersebut memang merupakan representasi dari apa yang diinginkan oleh rakyat sehingga hasilnya akan kembali kepada rakyat itu juga nantinya.

Hubungan Stakeholder dalam Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengertian *stakeholder* dalam konteks ini adalah tokoh – tokoh masyarakat baik formal maupun informal, seperti pimpinan pemerintahan (lokal), tokoh agama, tokoh adat, pimpinan organisasi sosial dan seseorang yang dianggap tokoh atau pimpinan yang diakui dalam pranata sosial budaya atau suatu lembaga (institusi), baik yang bersifat tradisional maupun modern.

Sebelum otonomi diterapkan bentuk-bentuk ”manajemen tertutup”, sehingga tidak transparan, tidak ada akuntabilitas kepada publik dalam pengelolaan anggaran. Dalam era reformasi, manajemen keuangan di pemerintan menerapkan ”manajemen terbuka” dari pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan sampai pada evaluasi, bahkan perbaikan kebijakan. Seluruh sumber daya yang digunakan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada seluruh kelompok masyarakat (*stakeholders*), dan selanjutnya terbuka untuk menerima kritikan perbaikan bila ditemukan hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu tanggung jawab yang besar sebelumnya diberikan kepada pemerintah daerah sekarang tanggung jawab tersebut menjadi tanggung jawab bersama diantara para *stakeholder* pemeritahan yang berkaitan langsung dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran tersebut, kemajuan pemerintahan tingkat Kabupate dan Kota akan banyak bergantung pada partisipasi dan masyarakat serta pemerintah Kabupaten dan Kota masing-masing di samping proyek-proyek khusus.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam bentuk APBD, yang menjadi salah satu aspek pelaksanaan otonomi daerah yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga bisa berpengaruh pada kesejahteraan

masyarakat. Berdasarkan hal tersebut APBD dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun demikian otonomi tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan dan kerja keras para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi guna stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan. Selain itu juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah yang pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat di daerah. Peranan keuangan daerah akan dapat meningkatkan kesiapan daerah untuk mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggungjawab.

Mamesah dalam Halim (2004) mengemukakan bahwa keuangan negara ialah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kekayaan daerah ini sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemerintah daerah sebagai sebuah institusi publik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana atau modal untuk dapat membiayai pengeluaran pemerintah tersebut (*government expenditure*) terhadap barang-barang publik (*public goods*) dan jasa pelayanan. Tugas ini berkaitan erat dengan kebijakan anggaran pemerintah yang meliputi penerimaan dan pengeluaran.

Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab memerlukan dana yang cukup dan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dana tersebut diperoleh melalui kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan. Oleh karena itu, keuangan daerah merupakan tolak ukur bagi penentuan kapasitas dalam menyelenggarakan tugas-tugas otonomi, di samping tolak ukur lain seperti kemampuan sumber daya alam, kondisi

demografi, potensi daerah, serta partisipasi masyarakat.

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Bastian (2006:273) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya.

Ukuran kinerja keuangan untuk pemerintah daerah

Menurut Halim (2004), untuk melihat kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Rasio derajat desentralisasi keuangan daerah
Rasio ini menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan.
- 2) Rasio ketergantungan keuangan daerah
Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi.
- 3) Rasio kemandirian keuangan daerah
Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan redistribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
- 4) Rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah
Rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan pemerintah daerah dalam membiisasi penerimaan pendapatn asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan memperoleh pendapatan asli daerah

dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100 %.

Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan daerah adalah seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Kemampuan daerah untuk dapat membiayai keuangan daerahnya antara lain dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah yang meningkat, dibandingkan dana perimbangan, semakin besar PAD maka ketergantungan terhadap pusat akan semakin kecil dan penggunaan surplus anggaran kepada alokasi belanja terutama belanja untuk pengembangan infrastruktur umum daripada pengeluaran pembiayaan untuk rekening pemegang kas daerah.

PAD idealnya menjadi sumber pendapatan pokok daerah. Sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan cenderung di luar kontrol kewenangan daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki, daerah diharap dapat meningkatkan PAD, sambil tetap memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan netralitas. Kinerja PAD terukur melalui ukuran *Growth*, *Elastisitas*, dan *Share* (www.perpustakaan.bappenas.go.id).

Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka menganalisis kemampuan keuangan daerah, perlu diperhatikan ketentuan dasar mengenai sumber-sumber penghasilan dan pembiayaan daerah. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 yaitu :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil perusahaan milik daerah
 - 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah
2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Hipotesis

H_{a1} Terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi

Bengkulu dilihat dari rasio desentralisasi fiska keuangan daerah sepuluh tahun terakhir.

H_{a2} Terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari rasio ketergantungan keuangan daerah sepuluh tahun terakhir.

H_{a3} Terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah sepuluh tahun terakhir.

H_{a4} Terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari rasio efektivitas sepuluh tahun terakhir.

H_{a5} Terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan keuangan Se-Provinsi Bengkulu dalam aspek kontribusi (share) PAD sepuluh tahun terakhir.

H_{a6} Terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan keuangan Se-Provinsi Bengkulu dalam aspek pertumbuhan (growth) sepuluh tahun terakhir.

METODE PENELITIAN

Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode sensus yaitu seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu yang bukan merupakan daerah pemekaran selama periode penelitian yakni pemerintah Kota Bengkulu, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, dan Rejang Lebong. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder diperoleh dari laporan realisasi anggaran Provinsi Bengkulu yang diambil dari www.djkgp.go.id berupa laporan realisasi anggaran tahun 1995-2012.

Operasionalisasi Variabel

Kinerja keuangan yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, dan pertumbuhan. Pengukuran tiap variabel disajikan yaitu:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah
Rasio ini menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi kontribusi pendapatan

asli daerah, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, Halim (2004). Perhitungannya:

$$\text{Derajat desentralisasi fiskal} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100 \%$$

Hasil perhitungan akan menunjukkan tingkat kemampuan desentralisasi dengan ukuran sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1 Kategori Tingkat Desentralisasi Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan	Desentralisasi keuangan
Sangat rendah	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi (mandiri)	75%-100%

Sumber : Nataludin (2001)

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah yaitu rasio yang mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, yang diukur dengan rasio antara pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi. Kategori dalam rasio ketergantungan sama dengan rasio kemandirian keuangan, dengan perhitungannya, Halim (2004).

$$\text{Rasio ketergantungan keuangan daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100 \%$$

Dalam dwiranda (2007), kategori ketergantungan keuangan daerah otonom terlihat dalam Tabel 2.

Tabel 2 Kategori Ketergantungan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan	Ketergantungan (%)
Rendah sekali	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi (ketergantungan)	75%-100%

Sumber : Dwiranda (2007)

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri. Semakin

tinggi rasio kemandirian maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin rendah, dan demikian juga sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin besar partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Rasio kemandirian secara matematika dapat dirumuskan sebagai berikut, Halim (2004).

$$\text{Rasio kemandirian daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100 \%$$

Dalam dwiranda (2007), kategori kemandirian keuangan daerah otonom terlihat dalam Tabel 3

Tabel 3 Kategori Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan	Kemandirian
Rendah sekali	0%-25%
Rendah	> 25% -50%
Sedang	> 50% -75%
Tinggi (mandiri)	> 75%-100%

Sumber : dwiranda (2007)

4. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Kemampuan efektivitas pendapatan asli daerah dikategorikan dalam 5 tingkat efektivitas sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4 Kategori Tingkat Efektivitas PAD

Kemampuan Keuangan	Rasio efektivitas
Sangat efektif	100%
Efektif	90%-100%
Cukup efektif	80%-90%
Kurang efektif	60%-80%
Tidak efektif	60%

5. Pertumbuhan (Growth)

Indeks pertumbuhan adalah perbandingan PAD antara tahun i dengan PAD tahun i-1.

$$G = \frac{(PAD_i - PAD_{i-1})}{PAD_{i-1}}$$

6. Kontribusi (Share)

Indeks share adalah proporsi dari PAD terhadap Total Belanja.

$$S = \frac{PAD}{Total\ Belanja}$$

Pengolahan Data Dan Analisis Data

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji beda dua variabel sampel berpasangan. Data diolah dengan program aplikasi SPSS. Pemilihan jenis pengujian uji beda (*paired sample t-test dan Wilcoxon Signed Ranks Test*) dilakukan setelah melakukan pengujian normalitas (Ritonga & Alam, 2010).

Alat Analisis Data

Pada penelitian ini, perbedaan kinerja keuangan dan kemampuan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan periode setelah tahun 2000 yaitu menggunakan tahun penelitian 2001-2006 dan 2007-2012. Selanjutnya menggunakan tahun penelitian sebelum tahun 2000, yaitu 1995-2000 dibandingkan dengan 2007-2012. Alat analisis yang digunakan yaitu uji beda dua variabel sampel berpasangan (*paired sample t-test*) bilamana kriteria hasil pengujian normalitas data menghasilkan suatu penyebaran yang normal. Namun apabila hasil pengujian normalitas tidak terpenuhi, maka digunakan pengujian *Wilcoxon Signed Ranks Test* (Ritonga & Alam, 2010).

Pengujian Hipotesis

Tingkat keyakinan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebesar 95%. Hasil pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah $\alpha = 5\%$. Pada uji dua arah (*two tailed*), nilai ρ -valuenya adalah $0,05/2 = 0,025$. Sehingga hipotesis akan diterima apabila ρ -valuenya kurang dari atau sama dengan 0,025 apabila ρ -value lebih besar dari 0,025 maka hipotesis ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan

daerah, rasio desentralisasi fiskal keuangan daerah, rasio efektivitas pengelolaan dan pelayanan keuangan daerah, rasio pertumbuhan (*growth*) dan rasio kontribusi (*share*) PAD selama sepuluh tahun terakhir dengan dibuat perbandingan antara tahun 2001-2006 dengan 2007-2012 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Hasil Pengujian Hipotesis Periode Penelitian 2001-2006 dan 2007-2012

	t/Z	Sig (2-tailed)	Kesimpulan
Hipotesis 1	-3,343 ^b	0,001	Diterima
Hipotesis 2	-0,543 ^b	0,578	Ditolak
Hipotesis 3	3,010	0,006	Diterima
Hipotesis 4	-0,032	0,974	Ditolak
Hipotesis 5	-1,714 ^b	0,086	Ditolak
Hipotesis 6	-1,943 ^c	0,052	Ditolak

Sumber: data sekunder diolah

Selanjutnya dilakukan cek balance rasio dengan menggunakan rasio yang sama untuk periode sebelum tahun 2000 yaitu 1995-2000 dibandingkan dengan 2007-2012 sebagaimana Tabel 6.

Tabel 6 Hasil Pengujian Hipotesis Periode Penelitian 1995-2000 dan 2007-2012

	t/Z	Sig (2-tailed)	Kesimpulan
Hipotesis 1	-1,086 ^b	0,278	Ditolak
Hipotesis 2	-1,714 ^b	0,086	Ditolak
Hipotesis 3	-0,525	0,604	Ditolak
Hipotesis 4	0,087	0,932	Ditolak
Hipotesis 5	-0,086 ^c	0,932	Ditolak
Hipotesis 6	-0,210	0,836	Ditolak

Sumber: data sekunder diolah

Untuk memberikan gambaran lebih lanjut berkenaan hasil pengujian hipotesis, maka dilihat bagaimana kategori kinerja keuangan setiap periode penelitian. Gambaran ini disajikan dalam Tabel 7 tentang kategori kinerja keuangan pemerintah daerah se-provinsi Bengkulu

Tabel 7 Kategori Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Bengkulu

Rasio Keuangan	Sebelum Otoda (1995-2000) %	Ket.	Krisis Ekonomi (2001-2006) %	Ket.	Setelah Otoda & Setelah Krisis Ekonomi (2007-2012) %	Ket.
Desentralisasi Fiskal	5,36	Sangat Rendah	3,78	Sangat Rendah	7,39	Sangat Rendah
Ketergantungan	88,40	Tinggi	109,41	Tinggi	120,03	Tinggi
Kemandirian	6,70	Rendah Sekali	4,01	Rendah Sekali	6,06	Rendah Sekali
Efektivitas	92,79	Efektif	94,01	Efektif	93,64	Efektif
Share	9,64	Sangat Kurang	14,05	Sangat Kurang	22,84	Sangat Kurang
Growht	19,13	Sangat Kurang	69,14	Sedang	17,09	Sangat Kurang

Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Bengkulu baik kabupaten maupun kota semakin menurun sejak sepuluh tahun terakhir ini, diketahui dari enam rasio yang digunakan peneliti dalam melihat kinerja keuangan hanya dua rasio yang mengalami peningkatan (*hipotesis nya diterima*) dari periode penelitian 2001-2006 dibandingkan dengan periode penelitian 2007-2012. Rasio tersebut ialah rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian keuangan daerah, namun peningkatan ini tidak cukup signifikan karena dilihat dari kategori ukuran persentasenya tidak berubah tetap tergolong **sangat rendah** untuk rasio derajat desentralisasi fiskal dan **rendah sekali** untuk rasio kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pendapatan yang dihasilkan dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta masih tingginya dana perimbangan dari pusat dimana sisa hasil anggaran tahun sebelumnya juga tergolong tinggi.

Empat rasio lainnya mengalami penurunan (*hipotesisnya ditolak*) dari periode penelitian 2001-2006 dibandingkan dengan periode penelitian 2007-2012 dan rasio tersebut adalah rasio ketergantungan keuangan daerah, hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) **semakin tinggi**, karena saat ini semakin rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio efektivitas keuangan daerah tergolong cukup efektif, karena pemerintah dianggap mampu dalam merealisasikan PAD dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio *growth* (pertumbuhan) PAD mengalami fluktuasi yang menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan dalam penerimaan PAD masih **sangat rendah** namun hasil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah, meski demikian peningkatan penerimaan PAD tidak secara otomatis meningkatkan rasio *share* (kontribusi) PAD dalam APBD sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi.

Berbeda lagi dengan perbandingan periode penelitian 1995-2000 dengan periode penelitian 2007-2012 bahwa pengujian hipotesis menunjukkan keenam rasio tersebut tidak mengalami perbedaan

peningkatan secara signifikan, hipotesis tersebut ditolak karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,025. Kinerja keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu baik pada kabupaten maupun kota dilihat dari sisi tingkat desentralisasi fiskal masih **sangat rendah sekali** hal itu menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan pembangunan dari pemerintah pusat relatif tidak mengalami peningkatan, tetapi juga tidak mengalami penurunan. Dengan kata lain bahwa berlakunya otonomi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu dalam penyelenggaraan pembangunan.

Pada intinya desentralisasi fiskal adalah menciptakan kemandirian keuangan dalam penyelenggaraan urusan daerah, yaitu untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing daerah, semakin besar nilai derajat desentralisasi fiskal maka semakin besar kemandirian daerah dalam pendanaan pelaksanaan tugas daerah baik kegiatan rutin maupun pembangunan. Berarti secara tidak langsung berhubungan dengan tingkat kemandirian yang terus mengalami penurunan. Hal ini bisa saja disebabkan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang melaksanakannya, sehingga sumber daya alam yang dimiliki tidak dapat dikembangkan dan dikelola secara maksimal.

Apabila kinerja keuangan dilihat dari rasio tingkat ketergantungan keuangan, maka periode 1995-2000 dan 2007-2012 atau sebelum dan sesudah otonomi daerah juga tidak mengalami perbedaan secara signifikan, tingkat ketergantungan masih dikategorikan **tinggi**. Artinya bahwa kemampuan pemerintah dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah relatif sama atau tidak ada peningkatan secara signifikan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah. Hal tersebut bahwa diberlakukannya otonomi daerah relatif tidak berpengaruh pada kemampuan pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah nya.

Rasio efektivitas menunjukkan hasil yang sama, kondisi tersebut dapat dilihat dari komponen rasio efektivitas, pada saat target pendapatan asli daerah meningkat, tetapi kondisi riil justru sebaliknya, hal ini bisa saja disebabkan oleh sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang terbesar yaitu berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah belum bisa dimaksimalkan. Begitu juga dengan rasio *share* dan *growth* yang masih tergolong **sangat rendah**.

Kinerja keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu dilihat dari rasio kemandirian keuangan

daerah tidak mengalami perbedaan yang signifikan, karena tingkat kemandirian nya masih tergolong **rendah sekali**, dengan demikian adanya otonomi daerah di pemerintah baik kabupaten maupun kota tidak mempengaruhi kemampuan keuangan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat juga disebabkan karena kondisi perekonomian di pemerintah daerah se Provinsi Bengkulu pada umumnya belum sepenuhnya kodusif, sehingga tingkat pendapatan dari wajib pajak relatif tidak stabil. Namun jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain nilai PAD kota Bengkulu jauh lebih besar, dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tetapi transfer pusat ditambah pinjaman juga mengalami peningkatan setiap tahunnya yang nilainya tidak sebanding.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan pada rasio derajat desentralisasi fiskal dalam perbandingan pada tahun penelitian 2001-2006 dengan 2007-2012. Namun tidak terdapat perbedaan dalam perbandingan tahun penelitian 1995-2000 dengan 2007-2012. Hal ini tidak berbeda secara signifikan karena dilihat dari penghitungan rasio bahwa rasio nya masih dikategorikan **sangat rendah** setiap periode penelitiannya untuk tingkat derajat desentralisasi fiskal.
2. Tidak terdapat perbedaan pada rasio ketergantungan keuangan daerah dalam perbandingan pada tahun penelitian 2001-2006 dengan 2007-2012. Hal ini sama dengan perbandingan tahun penelitian 1995-2000 dengan 2007-2012 yang juga menunjukkan tidak terdapat perbedaan. Hal ini didukung dari penghitungan rasio bahwa rasio nya masih dikategorikan **tinggi** setiap periode penelitiannya untuk tingkat ketergantungan keuangan daerah.
3. Terdapat perbedaan pada rasio kemandirian dari aspek tingkat kemandirian dalam perbandingan pada tahun penelitian 2001-2006 dengan 2007-2012. Namun tidak terdapat perbedaan dalam perbandingan tahun penelitian 1995-2000 dengan 2007-2012. Hasil yang sama juga ditunjukkan bahwa baik kabupaten maupun kota tingkat kemandirian nya masih **rendah sekali** dalam periode penelitian 1995-2000, 2001-2006, 2007-2012.
4. Sedangkan aspek efektivitas Tidak terdapat perbedaan pada rasio dalam perbandingan pada tahun penelitian 2001-2006 dengan 2007-2012. Hal ini sama dengan perbandingan tahun

penelitian 1995-2000 dengan 2007-2012 yang juga menunjukkan tidak terdapat perbedaan. Hal ini didukung dari penghitungan rasio bahwa rasio nya dikategorikan **efektif** setiap periode penelitiannya untuk tingkat efektivitas keuangan daerah.

5. Tidak terdapat perbedaan pada rasio *share* dalam perbandingan pada tahun penelitian 2001-2006 dengan 2007-2012. Hal ini sama dengan perbandingan tahun penelitian 1995-2000 dengan 2007-2012 yang juga menunjukkan tidak terdapat perbedaan. Hal ini didukung dari penghitungan rasio bahwa rasio nya masih dikategorikan **sangat kurang** setiap periode penelitiannya untuk rasio *share*.
6. Tidak terdapat perbedaan pada rasio *growht* dalam perbandingan pada tahun penelitian 2001-2006 dengan 2007-2012. Hal ini sama dengan perbandingan tahun penelitian 1995-2000 dengan 2007-2012 yang juga menunjukkan tidak terdapat perbedaan. Hal ini didukung dari penghitungan rasio bahwa rasio nya masih dikategorikan **sangat kurang** setiap periode penelitiannya untuk rasio *growht*. Hasilnya menunjukkan di setiap kabupaten maupun kota selalu mengalami fluktuatif, yaitu terjadi peningkatan namun tidak signifikan karena masih tergolong **sangat kurang**.

Implikasi Penelitian

1. Untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri, dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang sampai saat ini masih dikuasai pemerintah pusat maupun provinsi selain itu meningkatkan total penerimaan daerah di masing-masing daerah kabupaten maupun kota dengan peningkatan jumlah pendapatan dan penerimaan pembiayaan, serta meningkatkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Serta meningkatkan pendaptan asli daerah (PAD) dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah dan tentu saja peran pemerintah sangat dibutuhkan dengan membuat kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang tetap berada dalam batasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan upaya peningkatan penerimaan PAD tidak semata-mata mengandalkan pajak dan retribusi tetapi juga

mengoptimalkan aspek-aspek lainnya, seperti peningkatan kualitas SDM; penyiapan sarana/prasarana dasar dan pendukung; peraturan dan perundangan yang memperhatikan aspek ekonomi dan desentralisasi kewenangan perijinan investasi; kebijakan pemberian fasilitas insentif kepada investor yang lebih menarik; dan optimalisasi potensi perekonomian lokal sehingga bermanfaat kepada daerah.

3. Secara keseluruhan pada dasarnya tujuan pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, dan salah satu hal yang paling penting adalah dengan meningkatkan penerimaan daerah karena dalam membangun suatu daerah menggunakan dana yang berasal dari daerah itu sendiri.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini daya generalisasi rendah karena hanya menggunakan unit analisis di pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu saja. Karena alasan kelengkapan data, sehingga kesimpulan yang bisa diambil hanya bisa diterapkan di pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu yang bukan merupakan daerah pemekaran.
2. Untuk penelitian selanjutnya bisa ditambahkan analisis atau pengukuran lainnya karena

penelitian ini hanya menggunakan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dengan enam alat ukur rasio.

Saran Bagi Penelitian Selanjutnya

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel penelitian yang lebih luas, sehingga dapat menilai kinerja keuangan di seluruh Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir ini. Penelitian lain dapat juga dilakukan secara empiris dengan melihat bagaimana kabupaten yang dimekarkan dari kabupaten induk sehingga bisa diketahui bagaimana perkembangan kabupaten yang dimekarkan setelah berpisah dengan kabupaten induk.
2. Alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah bisa ditambahkan tidak hanya menggunakan rasio atau analisis pendapatan saja, tapi bisa menggunakan analisis belanja dan analisis pembiayaan sehingga kesimpulan yang dihasilkan lebih akurat dan tidak hanya dari pendapatan saja.
3. Adapun yang menjadi temuan secara umum yang berkaitan dengan penelitian ini adalah akibat terjadinya pemekaran kabupaten/kota, sehingga banyak daerah yang mengalami penurunan anggaran dan penurunan pendapatan asli daerah akibat semakin kecilnya daerah yang diatur oleh pemerintahan kabupaten/kota ini.

REFERENSI

- Abdullah, M. Faisal. 2005. *Manajemen Perbankan*, Edisi Kelima. Malang: UMM Press
- Brigham, F. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Damayanti, P. 2010. Analisis pengaruh ukuran (SIZE), Capital Adequacy Ratio (CAR), Pertumbuhan deposit, Loan to Deposit Rasio (LDR), terhadap Profitabilitas perbankan *Go public* Di Indonesia tahun 2005 – 2009 (studi empiris perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*. Volume 3 Nomor 2, November 2012. STIE Semarang
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 3. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Helfert, E. 1997. *Analisis Laporan Keuangan* Terjemahan Herman Wibowo Jilid 1 Jakarta: Erlangga
- Kuncoro, M. dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Salemba Empat
- Mamduh, M. Hanafi dan Abdul halim. 2009. *Analisis laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Muchdarsyah, S. 2000. *Manajemen Dana Bank*. Edisi ke 2. Jakarta: PT. Bumi Akarsa.

- Nahti, H. Mabchut, Jaryono dan Najimudin. 2012. Pengaruh *Current Ratio*, *Debt to Total Asset Ratio*, *Total Asset Turnover (TATO)*, BOPO, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Manajemen*. (<http://manajemen.unsoed.ac.id>).
- Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013 tentang Revisi Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Bank Umum di Indonesia.
- Sekaran, Uma. 2009. *Research Methods for Business 4th Ed, Metodologi Penelitian untuk Bisnis Edisi 4. Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Sofyan, S. 2002. Pengaruh Struktur Pasar terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia. *Media Riset Bisnis dan Manajemen*. Vol.2 No 3. hal.194-219
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ketujuh. Bandung: Alfabeta
- Vironika, N.M dan Budiasih 2013. Pengaruh *Debt to Equity Ratio*, *Firm Size*, *Inventory Turnover* dan *Assets Turnover* pada Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. ISSN: 2302-8556. No. 5.2 hal.261-273.